



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMEINTAH (LKjIP)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA

JL. Taruna Gedung BLK Ranai
Kabupaten Natuna



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2025.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 belum secara sempurna menyajikan prinsip Akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dimasa yang akan datang, dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, kami ucapkan terimakasih, semoga menjadi amal hendak-NYA Amin.

Ranai, 19 Januari 2026





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2025 sebesar 99,93 persen dengan skala penilaian sangat memuaskan sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Natuna, adapun Perjanjian Kinerja tersebut berisikan 1 Sasaran Kinerja dan 1 Indikator Kinerja.

Akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dimana total anggaran belanja APBD tahun 2025 sebesar Rp. 5,437,776,348.00 terealisasi sebesar Rp. 5,202,458,648.00 (95,67%).



Efisiensi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 sebesar Rp. 235,317,700.00 atau 4,33%. Efisiensi berupa sisa belanja tahun 2024.

**DAFTAR ISI****HALAMAN**

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	4
Bab I Pendahuluan.....	5
1.1 Gambaran Umum.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	11
1.3 Sistematika Penulisan.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja.....	18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	21
2.3. Program Kerja dan Kegiatan.....	33
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	38
3.1. Pengukuran Kinerja.....	38
3.2. Analisis Kinerja.....	40
3.3. Analisis Keuangan.....	61
Bab IV Penutup.....	82
Lampiran – lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

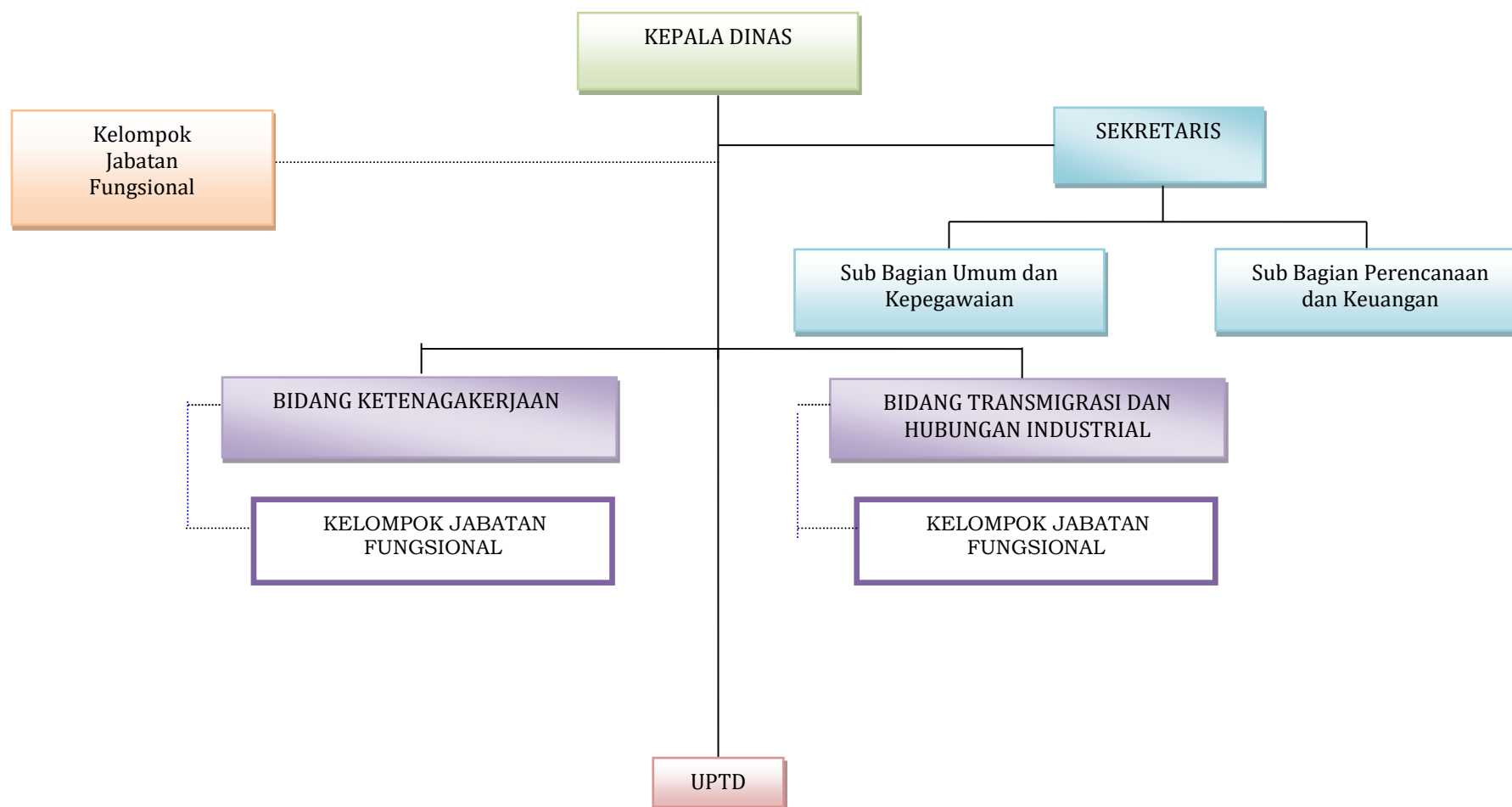
Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57). Dengan Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1
BAGAN STUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA





A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

B. Fungsi

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, dan setiap bidangnya yang meliputi butir-butir pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai berikut :



- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan;
 - c. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup dinas;
 - d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak; terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset dan barang persediaan di lingkup Dinas;
 - f. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
 - g. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai dilingkup dinas;
 - h. mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan permasalahan mendasar yang bersifat krusial, berdampak luas, dan memerlukan perhatian serius serta langkah strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna. Dari hasil analisa dan telaahan tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, Kabupaten Natuna masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kompetensi tenaga kerja,

ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja (*mismatch*), serta terbatasnya akses terhadap pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan sulitnya tenaga kerja lokal bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama melalui program peningkatan kompetensi kerja, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta penguatan kelembagaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna.

2. Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan kerja
Penyelenggaraan pelatihan kerja di Kabupaten Natuna belum optimal, baik dari sisi jumlah, mutu, maupun kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menyebabkan lulusan pelatihan belum memiliki daya saing dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Diperlukan upaya peningkatan kualitas lembaga pelatihan, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha agar pelatihan kerja lebih efektif dan berdampak nyata.
3. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja
Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja merupakan isu strategis penting dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna. Hingga saat ini, lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung seluruh angkatan kerja, terutama bagi lulusan baru dan tenaga kerja dengan

keterampilan rendah. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer, terbatasnya investasi industri padat karya, serta belum berkembangnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kendala utama dalam menciptakan peluang kerja baru.

Selain itu, perubahan pola ekonomi dan kemajuan teknologi juga menuntut adaptasi terhadap jenis pekerjaan baru yang lebih berbasis digital dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu dalam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja. Upaya ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat Natuna.

4. Perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan industrial

Perlindungan tenaga kerja dan peningkatan hubungan industrial merupakan isu strategis penting dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Di Kabupaten Natuna, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak pekerja, penerapan norma ketenagakerjaan, kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan kerja, ketidakpastian status ketenagakerjaan, serta lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor informal.

5. Pengembangan kawasan transmigrasi

Pengembangan kawasan transmigrasi merupakan isu strategis yang berperan penting dalam pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna. Kawasan transmigrasi memiliki potensi besar sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha produktif lainnya.

Selain itu, masih diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat transmigran dan penduduk setempat agar mampu mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor juga dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang mandiri dan berdaya saing. Dengan pengelolaan yang terpadu, kawasan transmigrasi di Kabupaten Natuna diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis



tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. (Sesuaikan dengan PD)
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada PD.
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK);
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (Tahun 2021-2026).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025.



1.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Berdasarkan telaah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Natuna terkait langsung dengan pencapaian :

- **Misi 1** : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
- **Misi 4** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

1.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sesuai cascading kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung Misi Pemerintah Daerah nomor satu yaitu **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan**, tujuan pembangunan daerah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis sektor unggulan**, sasaran pembangunan daerah **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** dan Misi Empat yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi**, tujuan Pembangunan Daerah **Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi**, sasaran pembangunan daerah **Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi**. Terkait hal tersebut tujuan dan tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan						
Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
1	Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,90
2		Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kegiatan	8
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi						
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi						
1		Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	2,76
2		Nilai SAKIP Pemerinntah Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,45

1.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dan Perjanjian



Kinerja Kepala OPD bersumber dari IKU OPD yang sudah ditetapkan. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2025.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.3.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<u>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</u> Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)

1.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Tabel II.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,90

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingginya TPAK mencerminkan potensi ekonomi suatu negara atau wilayah dalam memanfaatkan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK Adalah :

- 1) Pendidikan dan keterampilan penduduk
- 2) Ketersediaan lapangan kerja
- 3) Kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan
- 4) Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja

1.3. Program Kerja dan Kegiatan

Program kerja dan kegiatan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Program dan kegiatan disusun mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, serta DPA Perangkat Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.

Adapun program, kegiatan serta Sub kegiatan pendukung untuk sasaran IKU sebagai berikut :

Tabel II.5
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,29
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80,33
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	0
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	2,33
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	15
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	33,33
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	0
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	0
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang mendukung sasaran IKU:



Tabel II.6.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Anggaran
Pendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
IKU						
Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja						
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	210.000.000	11.603.540	198.396.460	8.533.540	3.070.000
	1. Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	210.000.000	11.603.540	198.396.460	8.533.540	3.070.000
	1.1. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	210.000.000	11.603.540	198.396.460	8.533.540	3.070.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	46.842.130	14.179.304	32.662.826	1.341.872	12.837.432
	1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	46.842.130	14.179.304	32.662.826	1.341.872	12.837.432
	1.1. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	46.842.130	14.179.304	32.662.826	1.341.872	12.837.432
	Program Hubungan Industrial	22.753.000	35.719.994	(18.434.681)	7.783.991	27.936.003



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
	1.	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	22.753.000	35.719.994	(12.966.994)	7.783.991	27.936.003
	1.1.	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	22.753.000	28.220.687	(5.467.687)	7.783.991	20.436.696
	1.2.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	7.499.307	(7.499.307)	-	7.499.307
		Total Sasaran 1	279.595.130	61.502.838	212.624.605	17.659.403	43.843.435



Pada tahun 2025 program pendukung IKU terdiri atas tiga program yaitu program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial, total anggaran sebelum efisiensi sebesar Rp.279.595.130,- setelah efisiensi menjadi Rp.61.502.838,- yang terdiri atas anggaran murni Rp. 17.659.403,- dan anggaran utang Rp. 43.843.435,- sehingga total efisiensi sebesar Rp. 212.624.605,-.

Selain sasaran pendukung IKU, terdapat juga sasaran beserta program, kegiatan Non IKU yaitu sasaran penunjang yang dimiliki OPD sebagai berikut :

Tabel II.7.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Non Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	2
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	90



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	65
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	74,20
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2
BALAI LATIHAN KERJA			
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

Sasaran Non IKU berkaitan dengan Program, kegiatan dan Sub kegiatan beserta Anggaran yang dilaksanakan Tahun 2025 :



Tabel II.8.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Anggaran
Non Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
Non IKU							
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi							
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		0	8.970.119	(8.970.119)	0	8.970.119
	1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0	8.970.119	(8.970.119)	0	8.970.119
	1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0	8.970.119	(8.970.119)	0	8.970.119
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		0	1.607.860	(1.607.860)	0	1.607.860
	1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	0	1.607.860	(1.607.860)	0	1.607.860
	1.1.	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	0	1.607.860	(1.607.860)	0	1.607.860



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
	Total Sasaran 2	0	10.577.979	(10.577.979)	0	10.577.979
Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	25.089.208	2.921.325	22.167.883	1.229.111	1.692.214
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.089.208	2.921.325	22.167.883	1.229.111	1.692.214
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.089.208	2.921.325	22.167.883	1.229.111	1.692.214
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.951.653.862	5.287.660.688	663.993.174	4.673.970.243	613.690.445
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.924.489.000	4.310.291.596	614.197.404	4.117.838.387	192.453.209
1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.924.489.000	4.310.291.596	614.197.404	4.117.838.387	192.453.209
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.053.360	147.298.936	96.754.424	95.205.336	52.093.600
2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.000.000	14.574.000	11.426.000	8.886.000	5.688.000
2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	35.522.182	(2.522.182)	18.373.682	17.148.500



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
	2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	31.238.000	(6.238.000)	12.000.000	19.238.000
	2.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	-	-	-	-
	2.5.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.053.360	65.964.754	91.088.606	55.945.654	10.019.100
	3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.400.000	148.378.430	(134.978.430)	1.400.000	146.978.430
	3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000	148.378.430	(134.978.430)	1.400.000	146.978.430
	4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.060.882	404.423.892	101.636.990	393.987.900	10.435.992
	4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.731.682	18.289.500	14.442.182	11.897.500	6.392.000
	4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.629.200	95.601.700	3.027.500	94.999.200	602.500
	4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.700.000	290.532.692	84.167.308	287.091.200	3.441.492



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
	5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.650.620	277.267.834	(13.617.214)	65.538.620	211.729.214
	5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.600.620	66.675.420	21.925.200	48.238.620	18.436.800
	5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.050.000	24.860.000	190.000	17.300.000	7.560.000
	5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	185.732.414	(35.732.414)	-	185.732.414
BALAI LATIHAN KERJA							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.000.000	75.113.518	38.886.482	4.945.412	9.145.826
	1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.400.000	12.113.083	43.286.917	3.745.412	3.745.412
	1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1.645.412	(1.645.412)	1.645.412	1.645.412
	1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.674.200	6.315.871	6.358.329	-	-

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2025****DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA**

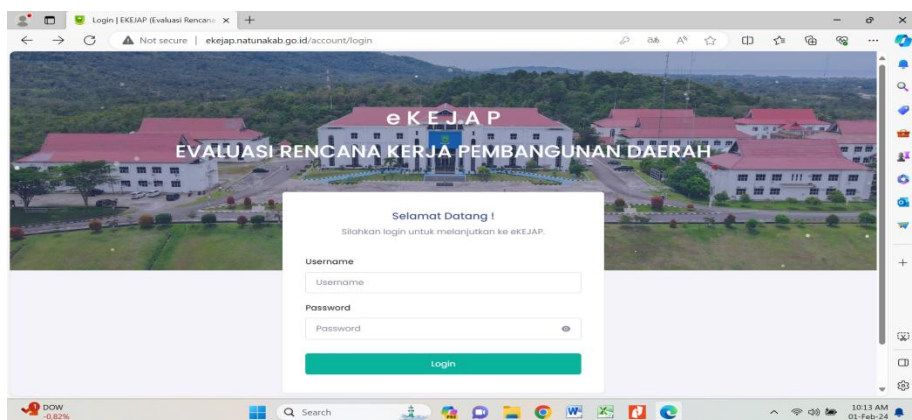
Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)	Efisiensi Anggaran (Rp)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Utang (Rp)
	1.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.051.800	3.551.800	(500.000)	1.500.000	1.500.000
	1.4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.674.000	600.000	39.074.000	600.000	600.000
	2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.600.000	63.000.435	(4.400.435)	1.200.000	5.400.414
	2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000	4.500.435	99.565	600.000	900.414
	2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	58.500.000	(4.500.000)	600.000	4.500.000
	Total Sasaran 3		6.090.743.070	5.365.695.531	725.047.539	4.680.144.766	624.528.485

Pada tahun 2025 program pendukung Non IKU terdiri atas tiga program yaitu program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (untuk menunjang kebutuhan rutinitas perkantoran pada Dinas dan BLK), total anggaran sebelum efisiensi sebesar Rp. 6.090.743.070,- setelah efisiensi menjadi Rp. 5.365.695.531,- yang terdiri atas anggaran murni Rp. 5.365.695.531,- dan anggaran utang Rp. 624.528.485,- sehingga total efisiensi sebesar Rp. 725.047.539,-.

1.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah aplikasi eKEJAP yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan.

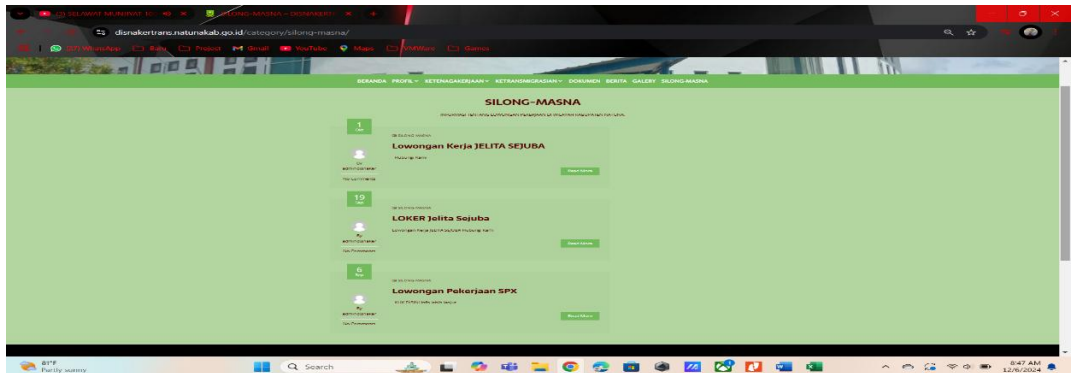
Gambar II.1. Sistem Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah eKEJAP



2. Layanan Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Masyarakat Natuna (SILong MasNa) merupakan wadah informasi berbasis website yang berfungsi untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi Masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, yang dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan pihak pemberi kerja (Perusahaan atau tempat-tempat usaha besar dan menengah) dengan tujuan layanan untuk memudahkan pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Natuna.



Gambar II.2. Sistem Informasi Lowongan Kerja (SILong MasNa)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna 2025-2029, kemudian difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator kinerja sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja strategis dengan realisasi kinerjanya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.



Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90–100	Sangat Memuaskan
2	A	>80–90	Memuaskan
3	BB	>70–80	Sangat Baik
4	B	>60–70	Baik
5	CC	>50–60	Cukup Baik
6	C	>30–50	Agak Kurang
7	D	0–30	Kurang

3.2 Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingginya TPAK mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam memanfaatkan tenaga kerja.

Tabel III.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,90	72,85	99,93

Capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diukur dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas, berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2025 jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 43.861orang, sementara jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas sebanyak 62.641orang, sehingga terealisasi sebesar 72,85 persen dengan capaian kinerja sebesar 99,93 persen.

Data berikut merupakan data usia kerja 15 Tahun ke atas yang bersumber dari Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025 :

Tabel: III.2
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2024

Indikator	Jumlah
Angkatan Kerja	45.634
Penduduk bekerja	43.861
Penduduk yang menganggur	1.773
Bukan Angkatan Kerja	17.007
Jumlah/Total	62.641

Sumber: NDA Kab. Natuna 2025

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Natuna memiliki tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 62.641 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 45.634 orang (72,85 persen), sedangkan 27,15 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan NDA 2025, Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 61,82 persen, kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 21,60 persen, dan paling sedikit pada Sektor Manufaktur sebesar 16,58 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan NDA 2024, dimana Sektor Jasa adalah lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, diikuti Sektor Pertanian dan Sektor Manufaktur.

Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi TPAK yaitu :

- Pendidikan dan keterampilan penduduk
- Ketersediaan lapangan kerja
- Kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan
- Program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna selama Tahun 2025 telah melakukan aksi yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau skill yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan berbasis kompetensi menekankan pada:

- Peningkatan keterampilan teknis sesuai industri
- Adaptasi terhadap perubahan teknologi
- Penyediaan sertifikasi sebagai bukti kompetensi pekerja

Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi erat hubungannya dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dalam hal :

- **Meningkatkan keterlibatan kerja:** Pelatihan yang relevan membuka peluang lebih besar bagi angkatan kerja untuk masuk ke sektor formal atau informal.
- **Mengurangi pengangguran:** Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
- **Memotivasi partisipasi:** Penduduk yang tidak aktif ekonomi, seperti ibu rumah tangga atau lulusan baru, dapat terdorong untuk masuk ke dunia kerja dengan adanya pelatihan.

Namun Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tidak dapat dijalankan secara optimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN, yang berdampak pada terbatasnya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, anggaran yang tersedia hanya menyisakan pembayaran utang tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan.

2. Program Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja mencakup kebijakan dan program yang bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, seperti:

- Pengembangan usaha kecil dan menengah

Hubungan antara program perluasan kesempatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu :

- **Menarik angkatan kerja potensial:** Dengan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, partisipasi angkatan kerja meningkat.
- **Mengurangi migrasi keluar:** Jika ada pekerjaan yang layak di dalam negeri, lebih banyak tenaga kerja lokal yang memilih untuk tetap bekerja di wilayah tersebut.
- **Meningkatkan produktivitas nasional:** Kesempatan kerja yang luas mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli.

Seperti yang terjadi pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Program Penempatan Tenaga Kerja juga terkena dampak efisiensi anggaran mengakibatkan keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada terbatasnya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, anggaran yang tersedia hanya menyisakan pembayaran utang tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel berikut menunjukkan tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 2019 s/d 2025:

Tabel: III.3
Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja	%
2019	168	35265	0.48
2020	187	38486	0.49
2021	240	40343	0.59
2022	333	38927	0.86
2023	456	42912	1.06
2024	554	42912	1.29
2025	554	43861	1.26

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi sejak tahun 2019 sampai tahun 2025 dengan tenaga kerja bersertifikat kompetensi berjumlah 554 orang, dalam pelaksanaan kegiatan didukung sumber anggaran dari APBD maupun APBN.

Pelaksanaan pelatihan bersumber APBN dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Natuna dengan paket pelatihan disesuaikan dengan alat praktek yang tersedia seperti paket menjahit, paket kelistrikan, paket otomotif dan paket las, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD paket pelatihan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dilaksanakan dengan melakukan MoU atau Kerjasama dengan penyedia jasa Balai pelatihan berbasis kompetensi, namun Tahun 2025 tidak terlaksana akibat efisiensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi

Tabel: III.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kegiatan	8	10	110,00

Pada sasaran Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna dengan indikator Jumlah Pengembangan di Kawasan Transmigrasi terealisasi sebesar 10 kegiatan dengan capaian 110.00 persen.



Adapun jenis kegiatan pengembangan Kawasan transmigrasi yang sudah dilaksanakan selama Tahun 2025 yaitu:

1. Singkronisasi Data Kepemilikan Lahan Usaha II Transmigran dan Pengurusan Penerbitan SK Status Kepemilikan Lahan Usaha II Atas Nama Transmigran Asli, Ahli Waris Dan Pengganti Hak Atas Tanah Transmigran Yang Tinggal Menetap Di Lokasi Eks. Permukiman Transmigrasi Untuk Penyelesaian Sertifikasi Lahan Usaha II Skp.B Batubi SP.1, SP.2 an SP.3 Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Tanggal 8 Agustus 2025 sebanyak 653 Bidang.
2. Melengkapi administrasi Usulan Penerbitan Sertifikasi Lahan Hak Milik Transmigran dan Menyusun Usulan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Transmigran sebanyak 653 Bidang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Pendampingan Survey Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia.
4. Pendampingan Tim Identifikasi Batas dan Kondisi HPL Transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi untuk penyusunan usulan Rencana Kawasan Transmigrasi.
5. Pendampingan Tim Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi dan Konsultan.
6. Penyusunan draft SK dan Pengurusan SK Bupati Natuna Nomor: 100.3.3.2-313 Tahun 2025 Tentang Pencadangan Tanah Untuk Calon Kawasan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Tanggal 10 November 2025.
7. Sosialisasi dan Pembinaan pada masyarakat dan desa Eks. Transmigrasi di wilayah Kawasan Transmigrasi dan sekitarnya bersama Kementerian transmigrasi dalam rangka Rengembangan dan Penetapan Kawsan Transmigrasi Bunguran Jaya Kabupaten Natuna.

8. Pendampingan Kegiatan Pemasangan Patok Blok Tebangan yang dilakukan Tim Pelepasan Kawasan Hutan HPK seluas 1.461 Ha untuk LU.II SKP.B Batubi SP.1, SP.2 dan SP.3.
9. Sosialisasi dan Pembinaan pada Masyarakat dan Aparatur Desa serta Kecamatan di Kecamatan Bunguran Batubi dan Kecamatan Bunguran Tengah terkait Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Investasi, Batas HPL, Batas SKP, Batas SP, Pemanfaatan Lahan dan Pengelanaan Aset Transmigrasi di desa Eks. Transmigrasi.
10. Pendampingan - pendampingan terhadap pihak swasta yang akan berinvestasi di kawasan Transmigrasi atas arahan Bupati Natuna dan Kementerian Transmigrasi.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Tabel: III.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	2,76	2,76	100,00
2	Nilai SAKIP	Nilai	74,45	74,45	100,00

Pada sasaran Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah, terdiri atas dua indikator yaitu indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah terealisasi sebesar 2,76 (menggunakan data Tahun 2024) dengan capaian kinerja 100 persen, dan indikator Nilai Sakip terealisasi sebesar 74,45 (menggunakan data Tahun 2024) dengan capaian kinerja 100,00 Persen.

Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah pada indikator Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP menunjukkan

komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

3.2.1. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir

Tabel berikut merupakan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel. III.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,33	72,35	72,36	72,90	67,89	72,43	72,85	72,85	93,86	100,11	100,68	99,93

Sumber data : Natuna Dalam Angka

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2022 realisasi kecil yaitu hanya sebesar 67,89 persen. Hal ini terjadi disebabkan pemulihan ekonomi belum merata, tahun 2022 merupakan masa transisi pemulihan dari pandemi COVID-19. Beberapa sektor mungkin masih dalam tahap pemulihan, sehingga belum banyak menyerap tenaga kerja. Tahun 2023 sampai 2025 terus mengalami kenaikan realisasi dari 72,43 naik menjadi 72,85 dan Tahun 2025 realisasi masih menggunakan data Tahun sebelumnya. hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja dan meningkatnya

keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, yang didukung oleh pelaksanaan program ketenagakerjaan di daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi

Tabel. III.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	n.a	n.a	n.a	8	n.a	n.a	n.a	10	n.a	n.a	n.a	110

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi untuk indikator Jumlah Pengembangan di Kawasan Transmigrasi dari tahun 2022 sampai 2024 belum tersedia dikarenakan Tahun 2025 merupakan realisasi Tahun pertama pada Periode Renstra Tahun 2025-2029, Tahun 2025 terealisasi sebesar 10 Kegiatan atau tercapai 110,00 Persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Tabel. III.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	2,76	n.a	n.a	n.a	2,76	n.a	n.a	n.a	100
2	Nilai SAKIP	81,88	81,89	81,9	74,45	81,65	71,05	74,2	74,45	99,72	86,763	90,5983	100

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian realisasi indikator Nilai Lakip mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan peningkatan kinerja yang baik dan akuntabel.

3.2.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Pernah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan tidak beragam serta tidak banyak pilihan dan tersedia hanya sektor tertentu saja seperti perikanan dan pariwisata, sehingga membatasi diversifikasi pekerjaan dan pilihan bagi angkatan kerja.

2. Minimnya Pelatihan dan Sertifikasi

Program pelatihan kerja yang terbatas menyulitkan angkatan kerja untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan guna percepatan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, diantaranya :

1. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna dalam penempatan lowongan kerja yang tersedia melalui Aplikasi SiLong MasNa (Sistem Informasi Lowongan Kerja Masyarakat Natuna);
2. Selain mengandalkan pelatihan bersumber dari dana APBD, Dinas Tenaga Kerja juga melakukan Kerjasama pelatihan dengan Balai Latihan Medan yang bersumber dari dana APBN dari



Kementerian TenagaKerja dengan paket-paket pelatihan yang disesuaikan dengan alat praktek yang tersedia di BLK Natuna, seperti : kejuruan menjahit, kejuruan otomotif dan kejuruan Listrik.

3.2.3. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjukkan Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2.3.1. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU

Tabel. III.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IKU
Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,29	1,26	97,60
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80,33	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	0	0	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	2,33	2,47	105,97
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	15	33	110,00
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	100
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	33,33	44,83	110,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	0	0	100
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	0	0	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250	10245	110,00

Program pendukung IKU terdapat 3 (tiga) program dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 1,26 persen dengan capaian kinerja sebesar 97,60 persen. Hal ini berasal dari penghitungan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sampai tahun 2025 sebanyak 554 orang, tidak ada penambahan jumlah orang yang mengikuti pelatihan tahun 2025, sementara itu jumlah tenaga keseluruhan tahun 2024 berjumlah 43.861 orang.

Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan realisasi sebesar 0,00 persen.

Sub kegiatan pendukung adalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan realisasi sebesar 0 persen.

Tidak adanya penambahan jumlah peserta pelatihan disebabkan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan capaian program, kegiatan maupun sub kegiatan tidak optimal.

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 2,47 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,97 persen.

Hal ini berasal dari Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2025 sebanyak 2 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2025 sebanyak 81 orang atau tercapai 2,47 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih terbatasnya lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten Natuna yang menyebabkan minimnya penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 33 lowongan kerja atau tercapai 110,00 persen.

Sub kegiatan pendukung adalah Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi sebesar 0 persen. Hal ini terjadi akibat adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan capaian sub kegiatan tidak optimal. Capaian kegiatan tetap tercapai melalui optimalisasi layanan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan sinergi dengan mitra ketenagakerjaan.

- 3) Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar 44,83 persen dengan capaian kinerja sebesar 110,00 persen.

Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak tahun 2025 sebanyak 13 perusahaan dari total Perusahaan tahun 2025 sebanyak 29 perusahaan.

Perusahaan yang terdata merupakan perusahaan yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Disnakertrans.

Kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 0 persen, namun untuk indikator kegiatan ini semakin kecil

realisasi maka semakin bagus kinerja yang tercapai, hal ini menunjukkan tidak adanya perselisihan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna.

Sub kegiatan pendukung adalah Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 0 persen, pada indikator ini sama seperti indikator pada kegiatan yang mana semakin kecil realisasi maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan atau tidak ada perkara yang diselesaikan.

3.2.3.2. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung NON IKU

Tabel. III.10
Capaian Sasaran serta program Pendukung Non IKU
Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100	100	100
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	1	100
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	1	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100	100	100
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	2	2	100
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	6	100
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	90	100,00	110,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	38	110
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	110,00	110,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	35	110
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	65	62,45	96,08
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59,50	8,56	14,38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	7	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	74,20	74,45	100,34



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74,20	95,25	110
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100
BALAI LATIHAN KERJA					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85	100	110
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	100	110
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100



Perbandingan realisasi capaian kinerja sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. III.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IKU
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0.16	1.29	806.88
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	77	80.33	104.32
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	16	100
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	94	2.33	2.47
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	7	15	214,28
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	20	100
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persen	4	33.33	833.33
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	60	0	100
	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	0	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3250	3762	115.75

Program pendukung IKU terdapat 3 (tiga) program dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 1,29 persen dengan capaian kinerja sebesar 806,88 persen. Hal ini berasal dari penghitungan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sampai tahun 2024 sebanyak 554 orang sementara itu jumlah tenaga keseluruhan tahun 2024 masih menggunakan data BPS Tahun 2023 berjumlah 42.912 orang. Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan realisasi sebesar 80,33 persen atau tercapai 104,32 persen. Hal ini berasal dari penghitungan Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi pada tahun n yang berjumlah 98 orang sedangkan jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n berjumlah 122 orang. Sub kegiatan pendukung adalah Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan realisasi sebesar 16 orang atau tercapai 100 persen.
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 2,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 2,47 persen. Hal ini berasal dari Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2024 hanya sebanyak 3 orang sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2024 sebanyak 129 orang atau tercapai 2,47 persen. Data yang digunakan bersumber dari data pencari kerja yang terdaftar atau AK1. Kecilnya capaian program salah satu penyebabnya adalah pencari kerja yang mendaftar AK1 tidak memberikan informasi ke Disnakertrans apakah mereka sudah ditempatkan atau tidak, padahal Disnakertrans sudah mengingatkan agar pendaftar AK1 selanjutnya melapor/memberikan informasi ke Disnaker terkait hal tersebut.

Sementara itu kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 15 lowongan kerja atau tercapai 214,29 persen.

Sub kegiatan pendukung adalah Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi sebesar 20 orang atau tercapai 100 persen.

- 5) Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar 33,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 833,33 persen.

Hal ini berasal dari jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak tahun 2024 sebanyak 9 perusahaan dari total Perusahaan tahun 2024 sebanyak 27 perusahaan.

Besarnya capaian program disebabkan Disnakertrans hanya mengakui bahwa perusahaan yang terdata merupakan Perusahaan yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Disnakertrans.

Kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 0 persen, namun untuk indikator kegiatan ini semakin kecil realisasi maka semakin bagus kinerja yang tercapai, hal ini menunjukkan tidak ada nya perselisihan yang terjadi antara pekerja dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Natuna.

Sub kegiatan pendukung adalah Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar perkara, pada indikator ini sama seperti indikator pada kegiatan yang mana semakin kecil realisasi maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan atau tidak ada perkara yang diselesaikan.



Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan realisasi sebesar 3762 orang atau 115,75 persen.

3.2.3.2. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung NON IKU

Tabel. III.12
Capaian Sasaran serta program Pendukung
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81.90	74.20	90.60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	74.20	74.20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100.00
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85	100.00	117.65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	59.00	118.75	201
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	27	135
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	60	62	104
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	8	200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59.40	13.06	21.99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	14	140
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	100
	Terwujudnya penyelesaian permasalahan keteransmigrasian di kawasan trasmigrasi Kabupaten Natuna	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100	100
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	1	100
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	1	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100	100	100



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang difasilitasi Pengembangannya	2	2	100
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	6	100
BALAI LATIHAN KERJA					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	85	100	117.65
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	59	100	169.49
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100

3.3 Analisis Keuangan

Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengelola anggaran sebesar Rp. 5,437,776,348.00, anggaran tersebut merupakan anggaran setelah efisiensi, anggaran sebelum efisiensi sebesar Rp. 6,370,338,200.00. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.927,094,165.00. Adapun realisasi Anggaran sebesar Rp.



5,202,458,648.00 (95,67%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 235,317,700.00 (4,33%). Sebagai perbandingan Tahun 2024 alokasi anggaran sebesar Rp. 7,104,937,632.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,879,327,587.00 (82,75) persen dengan sisa anggaran anggaran Rp. 1,225,610,045,- .

Berdasarkan data tersebut, pengelolaan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025 menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran dibandingkan Tahun 2024. Meskipun pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp 927.094.165,00 dari pagu awal, tingkat realisasi anggaran justru sangat tinggi, yakni mencapai 95,67%, dengan sisa anggaran yang relatif kecil sebesar 4,33%. Hal ini mencerminkan perencanaan yang lebih realistis serta pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal dan terukur.

Tabel. III.13
Capaian Sasaran beserta Realiasi Program Pendukung
Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
IKU					
Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					99,93
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.603.540	9.802.920	84,48	97,60
	1. Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	11.603.540	9.802.920	84,48	0,00
	1.1. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	11.603.540	9.802.920	84,48	0,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.179.304	12.932.433	91,21	105,97
	1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	14.179.304	12.932.433	91,21	110,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.1.	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	14.179.304	12.932.433	91,21	0,00
	Program Hubungan Industrial		35.719.994	29.021.249	81,25	110,00
	1.	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	35.719.994	29.021.249	81,25	100,00
	1.1.	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	28.220.687	21.521.942	76,26	100,00
	1.2.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.499.307	7.499.307	100,00	110,00
Total Sasaran 1			61.502.838	51.756.602	84,15	
Non IKU						
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi						110,00
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		8.970.119	8.970.119	100,00	100,00
	1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	8.970.119	8.970.119	100,00	100,00
	1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	8.970.119	8.970.119	100,00	100,00
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		1.607.860	1.607.860	100,00	100,00
	1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1.607.860	1.607.860	100,00	100,00
	1.1.	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	1.607.860	1.607.860	100,00	100,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
Total Sasaran 2		10.577.979	10.577.979	100,00	
Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah					100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.290.582.013	5.079.071.834	96,00	110,00
	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.310.291.596	4.274.242.844	99,16	100,00
	1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.310.291.596	4.274.242.844	99,16	110,00
	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.298.936	96.703.572	65,65	110,00
	2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.574.000	12.836.039	88,07	100,00
	2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.522.182	34.440.875	96,96	100,00
	2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.238.000	29.587.610	94,72	100,00
	2.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.964.754	19.839.048	30,08	110,00
	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.378.430	147.001.764	99,07	96,08
	3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.378.430	147.001.764	99,07	100,00
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.423.892	290.297.776	71,78	100,00
	4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.289.500	17.908.500	97,92	100,00
	4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.601.700	51.241.635	53,60	100,00
	4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.532.692	221.147.641	76,12	100,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.267.834	269.045.678	97,03	14,38
	5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.675.420	58.585.264	87,87	100,00
	5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.860.000	24.728.000	99,47	100,00
	5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.732.414	185.732.414	100,00	100,00
Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah						100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		2.921.325	1.780.200	60,94	100,34
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.921.325	1.780.200	60,94	100,34
	1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.921.325	1.780.200	60,94	100,00
BALAI LATIHAN KERJA						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.113.518	61.052.233	81,28	110,00
	1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.113.083	4.024.939	33,23	110,00
	1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.645.412	1.645.412	100,00	100,00
	1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.315.871	279.527	4,43	100,00
	1.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.551.800	1.500.000	42,23	100,00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000	600.000	100,00	100,00
	2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.435	57.027.294	90,52	100,00
	2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.435	3.027.294	67,27	100,00
	2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.500.000	54.000.000	92,31	100,00
	Total Sasaran 3		5.365.695.531	5.140.124.067	95,80	
	Total Sasaran		5.437.776.348	5.202.458.648	95,67	

Perbandingan realisasi anggaran sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. III.14
Capaian Sasaran beserta Realiasi Program Pendukung
Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
IKU						
Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja						100.10
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		270,644,450	222,265,949	82.12	774.24
	1.	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	270,644,450	222,265,949	82.12	104
	1.1.	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	270,644,450	222,265,949	82.12	100



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	Program Penempatan Tenaga Kerja		93,130,970	71,689,925	76.98	2.47
	1.	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	93,130,970	71,689,925	76.98	171,43
	1.1.	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	93,130,970	71,689,925	76.98	100
	Program Hubungan Industrial		128,600,980	45,497,086	35.38	833.33
	1.	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	128,600,980	45,497,086	35.38	100
	1.1.	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	91,645,980	33,196,886	36.22	100
	1.2.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36,955,000	12,300,200	33.28	116
Total Sasaran 1			492,376,400	339,452,960	68.94	
Non IKU						
Sasaran 2 : Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel						90.60
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		32,192,080	6,193,070	19.24	90.60
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,192,080	6,193,070	19.24	74.20



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,192,080	6,193,070	19.24	100.00
Total Sasaran 2			32,192,080	6,193,070	19.24	
Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima						97.99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		6,350,218,692	5,362,658,277	84.45	117.65
	1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,906,503,852	4,548,262,594	92.70	100.00
	1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,906,503,852	4,548,262,594	92.70	100.00
	2.	Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,388,640	244,914,874	58.82	100.13
	2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31,479,000	22,390,000	71.13	100.00
	2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,733,300	19,594,300	51.93	100.00
	2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,736,400	2,730,000	99.77	100.00
	2.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,395,340	10,988,900	33.92	100.00
	2.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000	675,000	9.64	100.00
	2.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305,044,600	188,536,674	61.81	155.00
	3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211,000,000	55,792,150	26.44	104.08



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211,000,000	55,792,150	26.44	200.00
	4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483,824,200	426,096,659	88.07	100.00
	4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,295,000	27,685,500	74.23	100.00
	4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,629,200	62,144,558	63.01	100.00
	4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347,900,000	336,266,601	96.66	100.00
	5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332,502,000	87,592,000	26.34	12.89
	5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,412,000	51,298,000	50.09	100.00
	5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,090,000	22,530,000	74.88	120.00
	5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	13,764,000	6.88	100.00
BALAI LATIHAN KERJA						
Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158,751,440	126,565,562	79.73	117.65



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,251,440	69,688,492	72.40	100.13
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,746,400	13,920,160	64.01	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	457,800	195,000	42.60	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,425,000	2,089,000	47.21	100.00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,622,240	53,484,332	76.82	620.00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,500,000	56,877,070	91.00	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	5,877,070	83.96	100.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,500,000	51,000,000	91.89	100.00
		Total Sasaran 3		6,508,970,132	5,489,223,839	84.33
Sasaran 4 : Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Trasmigrasi Kabupaten Natuna						127.75
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		41,230,420	26,956,678	65.38	100.00
	1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420	26,956,678	65.38	100.00
	1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,230,420	26,956,678	65.38	100.00
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		30,168,600	17,501,040	58.01	100.00



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Capaian Indikator Kinerja (%)
	1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	30,168,600	17,501,040	58.01	100.00
	1.1.	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	30,168,600	17,501,040	58.01	100.00
	Total Sasaran 4		71,399,020	44,457,718	62.27	
	Total Sasaran		7,104,937,632	5,879,327,587	82.75	

Tabel. III.15
Kewajibana atau Utang Tahun 2024
Yang Dibayarkan pada Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Utang (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		3.070.000	3.070.000	100
	1.	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	3.070.000	3.070.000	100
	1.1.	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	3.070.000	3.070.000	100
II.	Program Penempatan Tenaga Kerja		12.837.432	12.837.432	100
	1.	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	12.837.432	12.837.432	100
	1.1.	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	12.837.432	12.837.432	100
III.	Program Hubungan Industrial		27.936.003	27.936.003	100
	1.	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	27.936.003	27.936.003	100
	1.1.	Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	20.436.696	20.436.696	100



NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Utang (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1.2.	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.499.307	7.499.307	100
IV.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		8.970.119	8.970.119	100
	1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	8.970.119	8.970.119	100
	1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	8.970.119	8.970.119	100
V.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		1.607.860	1.607.860	100
	1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1.607.860	1.607.860	100
	1.1.	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	1.607.860	1.607.860	100
VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		1.692.214	1.692.214	100
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.214	1.692.214	100
	1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.692.214	1.692.214	100
VII.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		613.690.445	613.690.445	100
	1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.453.209	192.453.209	100
	1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	192.453.209	192.453.209	100
	2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.093.600	52.093.600	100
	2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.688.000	5.688.000	100
	2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.148.500	17.148.500	100
	2.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.238.000	19.238.000	100
	2.4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.019.100	10.019.100	100
	3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.978.430	146.978.430	100
	3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.978.430	146.978.430	100
	4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.435.992	10.435.992	100



NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Utang (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.392.000	6.392.000	100
4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.500	602.500	100
4.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.441.492	3.441.492	100
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.729.214	211.729.214	100
5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.436.800	18.436.800	100
5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.560.000	7.560.000	100
5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.732.414	185.732.414	100
BALAI LATIHAN KERJA				
VIII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.145.826	9.145.826	100
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.745.412	3.745.412	100
1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.645.412	1.645.412	100
1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	1.500.000	100
1.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000	600.000	100
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.400.414	5.400.414	100
2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.414	900.414	100
2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	4.500.000	100
Total		624.528.485	624.528.485	100

Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kewajiban atau utang Tahun 2024 sebesar Rp. 624,528,485.00 dan terealisasi sebesar Rp. 624,528,485.00 atau (100 %).



1.4. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

III.16.
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran dan Program IKU									
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,9	72,85	99,93	61.502.838,00	51.756.602,00	84,15	9.746.236,00
Sasaran dan Program Pendukung									
2	Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigras	8	10	110,00	10.577.979,00	10.577.979,00	100,00	-
3	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,76	2,76	100,00	5.362.774.206,00	5.138.343.867,00	95,82	224.430.339,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,45	74,45	100,00	2.921.325,00	1.780.200,00	60,94	1.141.125,00
Total						5.437.776.348,00	5.202.458.648,00	95,67	235.317.700,00

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran berdasarkan sasaran selama Tahun 2025 sebesar Rp. 5,202,458,648.00 atau 86,16% dari total anggaran sebesar Rp. 5,437,776,348.00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 235,317,700.00 atau 13,13%.

Perbandingan Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagai tabel berikut :



III.17.

Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran dan Program IKU								
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,36	72,43	100.11	492,376,400.00	339,452,960.00	68.94	152,923,440.00
2	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Keteransmigrasian di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Persentase Penyelesaian Permasalahan keteransmigrasian yang diselesaikan	65	83.04	127.75	71,399,020.00	44,457,718.00	62.27	26,941,302.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	81.9	74.2	90.60	32,192,080.00	6,193,070.00	19.24	5,999,010.00
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.41	90.78	6,508,970,132.00	5,489,223,839.00	84.33	1,019,746,293.00
	Total					7,104,937,632.00	5,879,327,587.00	82.75	1,225,610,045.00

Perbandingan efisiensi anggaran Tahun 2024 lebih besar dibandingkan efisiensi Tahun 2025. Hal ini terjadi disebabkan perbandingan realisasi anggaran menunjukkan bahwa secara nominal realisasi anggaran Tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran Tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2025, sehingga nilai realisasi yang dihasilkan juga lebih besar.

Namun demikian, apabila dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih baik, karena persentase realisasi mencapai 95,67%, jauh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 sebesar 82,75%. Dengan kata lain, meskipun nilai realisasi Tahun 2024 lebih besar secara absolut, efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran justru meningkat pada Tahun 2025, seiring dengan



perencanaan yang lebih realistis dan pengendalian anggaran yang lebih baik.

1.5. Capaian kinerja Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar							
2.1 Urusan Tenaga Kerja							
1	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	0,8	0	0,00	0,8	Pelatihan tidak berjalan, terdapat efisiensi anggaran
2	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0,00	1	Penyusunan RTKD dilaksanakan pada Tahun 2027
3	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	20	0	0,00	25	Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna
4	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	BKK	6	5	83,33	6	1. SMKN 1 Bunguran Timur 2. SMKN 2 Bunguran Timur 3. SMKN 1 Bunguran Barat 4. SMKN 1 Bunguran Timur Laut 5. SMKN 2 Bunguran Barat
5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Orang	20	0	0,00	25	Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna
6	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Orang	20	0	0,00	25	Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna
7	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Orang	20	0	0,00	25	Belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna
8	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKTS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	1	0	0,00	1	Kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di Kabupaten Natuna
9	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	5	33	110,00	5	Tercapai
10	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	1	1	100,00	1	Tercapai
11	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Orang	749	820	109,48	799	Tercapai
12	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	10	0	0,00	10	Tidak tersedianya Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
13	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Layanan	379	0	0,00	379	Terdapat efisiensi anggaran



No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD (2027)	Keterangan
14	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Perjanjian	3	40	110,00	3	Tercapai
15	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Kasus	0	0	100,00	0	Tidak terdapat perselisihan
16	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Kasus	0	0	100,00	0	Tidak terdapat perselisihan
17	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	80.43	0	0,00	80.45	Terdapat efisiensi anggaran
18	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100	100	Tercapai
19	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Persen	1	0	0	100	Tidak terdapat perselisihan
20	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	100	100	100	100	Tercapai
21	Persentase LPK yang Terakreditasi	Persen	100	0	0,00	100	Belum terakreditasi
22	Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	33.33	0	0,00	33.33	Terdapat efisiensi anggaran
23	Persentase Penyerapan Lulusan	Persen	41.89	0	0,00	44.59	Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten/Kota
24	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	0	0	0	100	Semakin rendah realisasi semakin baik capaian yang dihasilkan
25	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	4	44,83	110,00	4	Tercapai
26	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Persen	5	27,59	110,00	6	Tercapai
27	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	4	3,45	86,21	4	Tercapai
28	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	45	44,83	99,62	50	Tercapai
29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,01	1,26	110,00	0,01	Tercapai
30	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi	Persen	50	0	0	60	Terdapat efisiensi anggaran
31	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	98	2,47	2,52	100	Terbatasnya lowongan kerja yang tersedia di Kab/Kota
32	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Persen	0.01	0	0,00	0.01	Terdapat efisiensi anggaran
33	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	98	96,11	98,08	100	Tercapai
3.6 Urusan Transmigrasi							
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	100,00	1	Tercapai
2	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Permukiman	2	6	300,00	2	Tercapai
3	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Satuan Permukiman	2	6	300,00	2	Tercapai



1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
Kinerja tidak tercapai, kegiatan pelatihan tidak jadi dilaksanakan disebabkan adanya efisiensi anggaran.
2. Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
Kinerja tidak tercapai, periode Renstra Tahun 2021-2029 seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2023 namun tidak tercapai terkendala anggaran, pada periode Renstra 2025-2029 penyusunan RTKD akan direncanakan pada Tahun 2027 mendatang.
3. Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
Kinerja tidak tercapai, belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna.
4. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja.
Kinerja tidak tercapai, belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna.
5. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota.
Kinerja tercapai sebesar 83,33 persen atau terealisasi 6 BKK. BKK yang sudah terbentuk adalah semua sekolah kejuruan tingkat atas yang ada di Kabupaten Natuna.
6. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.
Kinerja tidak tercapai, belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna.
7. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata.
Kinerja tidak tercapai, belum tersedianya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI di Kabupaten Natuna.
8. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota.
Kinerja tidak tercapai, kurangnya minat pihak swasta untuk mendirikan lembaga penempatan tenaga kerja karena minimnya pasar kerja di Kabupaten Natuna.
9. Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota
Kinerja tercapai 110 persen, lowongan yang tersedia selama tahun 2025 sebanyak 33 lowongan.
10. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
Kinerja tercapai 100 persen, jumlah pejabat fungsional pengantar kerja tersedia 1 orang.



11. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota
Kinerja tercapai 109,48 persen, pencari kerja yang terdaftar sampai tahun 2025 berjumlah 820 orang atau bertambah 81 orang
12. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
Kinerja tidak tercapai, tidak tersedianya Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).
13. Jumlah Penganggur yang Dilatih
Kinerja tidak tercapai, pelatihan tidak dijalankan disebabkan efisiensi anggaran.
14. Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Kinerja tercapai 110 persen, jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 40 perjanjian.
15. Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan
Kinerja tercapai 100 persen, tidak ada perselisihan yang terjadi.
16. Jumlah Perselisihan Kepentingan
Kinerja tercapai 100 persen, tidak ada perselisihan yang terjadi
17. Lulusan Bersertifikat Kompetensi
Kinerja tidak tercapai, pelatihan tidak dijalankan disebabkan efisiensi anggaran
18. Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi
Kinerja tercapai 100 persen, instruktur bersertifikat kompetensi yang ada di BLK berjumlah 3 orang.
19. Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih
Kinerja tercapai 100 persen, tidak ada perselisihan yang terjadi
20. Persentase LPK yang Memiliki Perizinan
Kinerja tercapai 100 persen, LPK yang memiliki perizinan BLK Natuna.
21. Persentase LPK yang Terakreditasi
Kinerja tidak tercapai, BLK Natuna belum terakreditasi sudah pernah mendapat penilaian namun belum memenuhi persyaratan.
22. Persentase Penerapan Program PBK dengan Kualifikasi KlasterKinerja tidak tercapai, pelatihan tidak dijalankan disebabkan efisiensi anggaran
23. Persentase Penyerapan Lulusan
Kinerja tidak tercapai, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten/Kota.
24. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
Kinerja tercapai 100 persen, tidak ada perselisihan yang terjadi.

25. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Kinerja tercapai 110 persen, Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak berjumlah 13 perusahaan total 29 perusahaan.
26. Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah
Kinerja tercapai 110 persen, jumlah Perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah sebanyak 8 perusahaan.
27. Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Kinerja tercapai 86,21 persen, jumlah Perusahaan yang sudah memiliki PKB sebanyak 1 perusahaan.
28. Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kinerja tercapai 99,62 persen, jumlah Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 13 perusahaan.
29. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Kinerja tercapai 110,00 persen, jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi sampai tahun 2025 berjumlah 554 orang, tidak ada penambahan tahun 2025 dikarenakan tidak adanya pelatihan, Jumlah tenaga kerja Tahun 2024 sebanyak 43.861 orang.
30. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi
Kinerja tidak tercapai, pelatihan tidak dilaksanakan tahun 2025 akibat efisiensi anggaran.
31. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Kinerja tidak tercapai, dari 81 pencari kerja hanya 2 pencari kerja yang ditempatkan atau terealisasi 2,47 persen, hal ini terjadi disebabkan terbatasnya lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten/Kota.
32. Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan
Kinerja tidak tercapai, pelatihan tidak dilaksanakan akibat efisiensi anggaran.
33. Rasio Penduduk yang Bekerja
Kinerja tercapai, jumlah angkatan kerja Tahun 2024 sebanyak 45.634 orang sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 62.641 orang.
34. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya
Kinerja tercapai, jumlah Kawasan transmigrasi yang tersedia 1 kawasan.



35. Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi
Pembangunannya
Kinerja tercapai, jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang
tersedia 6 SP.
36. Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
Kinerja tercapai, jumlah satuan permukiman yang dibina
terdapat 6 SP.

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menetapkan satu sasaran dengan satu indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2025 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja mampu direalisasikan dengan baik yaitu sebesar 99,93 % atau interpretasi sangat memuaskan.

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2025 sangat memuaskan, bukan berarti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja strategis yang ditetapkan, kendala yang dihadapi yaitu :

- 1) Lulusan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia;
- 2) Masih banyaknya lulusan pelatihan yang menganggur;
- 3) Lapangan pekerjaan terbatas, Kabupaten Natuna bukanlah merupakan daerah industri seperti kota-kota besar, lapangan pekerjaan yang tersedia terlalu sedikit sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit yang menyebabkan pengangguran;
- 4) Anggaran yang terbatas.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengambil langkah (strategi) pemecahan sebagai berikut :



- 1) Berkomitmen untuk menjadikan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagai program unggulan untuk peningkatan kompetensi bagi pencari kerja;
- 2) Melakukan kerjasama atau MoU dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Natuna dalam hal penempatan tenaga kerja terkhusus bagi alumni pelatihan;
- 3) Mengoptimalkan Sistem Informasi Lowongan Kerja Masyarakat Natuna (SilongMasna) sebagai wadah pemberi dan pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja;
- 4) Berupaya agar program pelatihan kerja bisa berjalan optimal setiap tahun baik bersumber dari APBD/APBN.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan agar dapat memberikan informasi dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ranai, 19 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA JONI, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,


INDRA JONI, S. Sos
NIP. 19700903 199201 1 001

Pihak Kedua,


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,37

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.090.743.070,00
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	210.000.000,00
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	46.842.130,00
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	22.753.000,00
Jumlah		Rp.	6.370.338.200,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

INDRA JONI, S. Sos
NIP. 19700903 199201 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **INDRA JONI, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CEN SUI LAN**
Jabatan : **Bupati Natuna**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

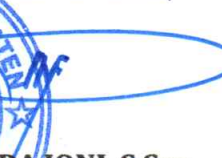
Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 6.370.338.200,00 (Enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp. 5.437.776.348,00 (Lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,

CEN SUI LAN

Pihak Pertama,

INDRA JONI, S.Sos
Nip. 19700903 199201 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,90

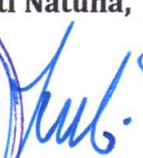
Jumlah Anggaran :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

	Sebelum	Sesudah
	Rp 6,090,743,070	Rp 5,365,695,531
	Rp 210,000,000	Rp 11,603,540
	Rp 46,842,130	Rp 14,179,304
	Rp 22,753,000	Rp 35,719,994
	Rp -	Rp 8,970,119
	Rp -	Rp 1,607,860
	Rp 6,370,338,200	Rp 5,437,776,348

Ranai, 24 Oktober 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bupati Natuna,

CEN SUI LAN


INDRA JONI S.Sos
Nip. 19700903 199201 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,90	72,85	99,93

	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	(%)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.365.695.531	5.140.124.067	95,80
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	11.603.540	9.802.920	84,48
- Program Penempatan Tenaga Kerja	14.179.304	12.932.433	91,21
- Program Hubungan Industrial	35.719.994	29.021.249	81,25
- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	8.970.119	8.970.119	100,00
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.607.860	1.607.860	100,00
	5.437.776.348	5.202.458.648	95,67

Ranai, 31 Desember 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi



INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001